



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2020/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Ujung Pandang, 05 Februari 1970, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Ujung Pandang, 20 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 305/Pdt.P/2020/PA Mks tanggal 29 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama, bernama **M Iqbal Abdullah**, umur 18 tahun, agama Islam,

hal 1 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Indah 6, Lorong 3, No 43. RT. 004, RW. 005, Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. dengan calon istrinya yang **Septiani Aenun Fadilla R**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar 8, No 15 F, RT 002, RW. 001, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perjaka serta sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena calon istri anak pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-421/KUA.21.12.09/PW.01/06/2020 tanggal 15 Juni 2020;

hal 2 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



7.-----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 049/RN/P2TP2A-MKS/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **M Iqbal Abdullah** yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **Septiani Aenun Fadilla R**;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon bernama **M. Iqbal Abdullah**, calon istri bernama **Septiani Aenun Fadillah R** dan orang tua calon istri bernama **Satria** telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dilanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

hal 3 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak kandungnya bernama **M. Iqbal Abdullah**, calon istri bernama **Septiani Aenun Fadillah R** dan orang tua calon istri bernama **Satria** di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan M. Iqbal Abdullah:

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan **Septiani** sudah lama;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan **Septiani** dan kini **Septiani** sudah hamil;
- Bahwa **Septiani** memberitahu saya bahwa dirinya sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMP;
- Bahwa saya setuju menikah dengan **Septiani** dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah sebagai karyawan Alfa Maret dengan penghasilan sebanyak Rp2200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Keterangan Septiani Aenun Fadillah R :

- Bahwa ia kenal dan sudah lama pacaran dengan **M. Iqbal Abdullah**;
- Bahwa saya sudah hamil, dan yang menghamili saya adalah **M. Iqbal Abdullah** karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Keterangan orang tua calon istri nama Satria:

hal 4 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



- Bahwa anak saya bernama **Septiani**, sudah dilamar oleh **M. Iqbal Abdullah** melalui orang tuanya tuanya untuk menikah;
- Bahwa lamarannya saya sudah terima dan segala terkait dengan pernikahan sudah disepakati bersama termasuk uang belanja, mahar dan lain sebagainya;
- Bahwa anak saya **Septiani**, berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa anak saya Hadinah sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa anak saya **Septiani** sudah hamil 7 (tujuh) bulan lebih;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon atas nama **Abdullah**, Nomor:7371070502700001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Hasni Bau**, Nomor:77371076010700001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.7371072911980321 tanggal 09 Agustus 2019, register No. 231/TC/DUKPIL/VIII/2019 atas **Abdullah/Pemohon I** sebagai Kepala Keluarga, **Hasni Bau** sebagai Pemohon II (istri) dan **M. Iqbal Abdullah** sebagai anak, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371.AL.2010.040444 tanggal 29 Desember 2010, atas nama **M. Iqbal Abdullah**, lahir tanggal 31 Oktober 2001 yang dikeluarkan
hal 5 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama **M. Iqbal Abdullah**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Makassar 11 Juni 2016, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah : 40307327 atas nama **Septiani Aienun Fadillah Rauf**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Makassar tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat Keterangan dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG tertanggal 23 Juni 2020, hasil pemeriksaan atas nama Ny. Septiani Iqbal, menerangkan bahwa umur kehamilan 33 minggu 1 hari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Rekomendasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Nomor: 048/RN/P2TP2A-Mks/VI/2020, Kota Makassar tanggal 25 Juni 2020, yang ditujukan kepada **M. Iqbal Abdullah** (catin laki-laki) dan **Septiani Aienun Fadillah** (catin perempuan) untuk menikah karena hasil pemeriksaan USG menyatakan **Septiani Aienun Fadillah** hamil, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B.420/kua.21.12.09/Pw.01/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang ditujukan kepada Septiani Aienun, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.9;

hal 6 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



b. bukti saksi:

1. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama **Abdullah**, kenal pula Pemohon II bernama **Hasni Bau**, keduanya sebagai suami istri dan saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak laki-lakinya bernama **M. Iqbal Abdullah**;
- Bahwa saksi tahu **M. Iqbal Abdullah** bekerja pada Alfa Maret, dan memperoleh penghasilan dua juta lebih perbulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama **M. Iqbal Abdullah** akan tetapi ditolak oleh KUA karena faktor umur, baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar perempuan **Septiani Aenun Fadillah** melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II dengan **orang tua Septiani Aenun Fadillah** sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu **M. Iqbal Abdullah dengan Septiani** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **Septiani** sudah hamil dan yang menghamili adalah **M. Iqbal Abdullah**;
- Bahwa saksi tahu **M. Iqbal Abdullah dan Septiani** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

2. **SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Abdullah, kenal pula Pemohon II bernama Hasni Bau, keduanya sebagai suami istri;

hal 7 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak laki-lakinya bernama M. Iqbal Abdullah;
- Bahwa saksi tahu M. Iqbal Abdullah bekerja di Afa Maret, saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama M. Iqbal Abdullah akan tetapi ditolak oleh KUA karena faktor umur, baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar perempuan **Septiani Aeinun Fadillah** melalui orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua **Septiani Aenun Fadillah** sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu **M. Iqbal Abdullah dengan Septiani** sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu **Septiani** sudah hamil dan yang menghamili adalah **M. Iqbal Abdullah**;
- Bahwa saksi tahu **M. Iqbal Abdullah dan Septiani** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

hal 8 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1 dan P.2), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan resiko perkawinan di bawah umur seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Hakim telah memberi nasihat anak Pemohon **M. Iqbal Abdullah**, calon istri **Septiani** dan orang tuanya bernama **Satria** terkait dengan resiko perkawinan seperti masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan akan mengawinkan anaknya bernama **M. Iqbal Abdullah** dengan seorang perempuan bernama **Septiani**, Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon istri telah merestui untuk mengawinkan anaknya karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Septiani** sudah hamil 7 (tujuh) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur,
hal 9 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan Pemohon I dan pemohon II sudah mendapat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sesuai surat Nomor 048/RN/P2TP2A-Mks/VI/2020, Kota Makassar tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Abdullah dan Hasni Bau** telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama **Abdullah** sebagai Kepala Keluarga sedangkan Pemohon II adalah istri, **M. Iqbal Abdullah** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Kelahiran atas nama **M. Iqbal Abdullah**, menerangkan bahwa **M. Iqbal Abdullah**, lahir pada tanggal 31 Oktober 2001, anak ketiga laki-laki dari ayah **Abdullah dan Hasni Bau**, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah ijazah pendidikan SMP atas namam **M. Iqbal Abdullah** bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Septiani Aeinun Fadillah R**, tanggal 29 Mei 2018, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa **Septiani Aeinun Fadillah R** telah tamat Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat hasil pemeriksaan Keterangan dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG tanggal 23 Juni 2020 isinya **hal 10 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks**



menerangkan bahwa Ny. Septiani Iqbal sudah hamil 33 minggu 1 hari, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Nomor: 048/RN/P2TP2A-Mks/VI/2020, Kota Makassar tanggal 25 Juni 2020, yang ditujukan kepada **M. Iqbal Abdullah dan Septiani Aeinun** Fadillah R telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P. 9 adalah surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B.421/kua.21.12.09/Pw.01/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, yang ditujukan kepada **M. Iqbal Abdullah**, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya bernama **M. Iqbal Abdullah** terdapat halangan kekurangan persyaratan (**P.9**) karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. Iqbal Abdullah** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Septiani Aeinun Fadillah R** yang telah dikenalnya/dilamarnya(pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, **M. Iqbal Abdullah, Septiani Aeinun Fadillah R dan orang tuanya**, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan saksi-saksi di

hal 11 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Makassar dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama **M Iqbal Abdullah**, umur 18 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah **M. Iqbal Abdullah dengan Septiani Aeinun Fadillah R** namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **M. Iqbal Abdullah** sudah tamat pada Sekolah Menengah Pertama dan sekarang tidak melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa **M. Iqbal Abdullah dan Septiani** sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan **Septiani** telah hami 33 mingg 1 hari;
- Bahwa antara **M. Iqbal Abdullah dan Septiani** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua **Septiani** telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa **M. Iqbal Abdullah** sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Alfa Maret dan memperoleh penghasilan sebesar Rp2.200.000,00(dua juta dua raus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membantu **M. Iqbal Abdullah** dalam ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M. Iqbal Abdullah** baru berumur 18 (delapan belas) Tahun, 8 (delapan) bulan dan sudah demikian eratnya hubungan cintanya
hal 12 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



dengan **Septiani** sehingga hamil dan umur kehamilan **Septiani** sudah 33 minggu 1 hari;

- Bahwa benar antara **M. Iqbal Abdullah dan Septiani** tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, dan **M. Iqbal Abdullah**, calon istri **Septiani** dan orang tuanya telah merestui untuk menikahkan **M. Iqbal Abdullah dan Septiani**;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M. Iqbal Abdullah** secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 18 (delapan belas) tahun, 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawian ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal

hal 13 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **M. Iqbal Abdullah** ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang Pria atau baru berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, namun **M. Iqbal Abdullah** mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak laki-laki lain yang sebaya dengannya, sudah mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan dan sudah saling mencintai dengan calon istrinya bahkan **Septiani** sudah hamil 7 (tujuh) bulan lebih, hal ini pula diakui oleh **Septiani** di muka sidang, orang tua dan saksi-saksi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M. Iqbal Abdullah** sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon istrinya bernama **Septiani**;

Menimbang, bahwa **M. Iqbal Abdullah** menurut Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan, kewajaran, hal-hal yang mendesak dan demi keselamatan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II maupun **M. Iqbal Abdullah, Septiani, dan orang tuanya** sudah bertekad
hal 14 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa mambawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَكْثَرُ الْأَيِّمِ مِنْكُمْ وَاصِلِينَ مِنْ عَلَيْكُمْ وَأُولَئِكَ أَنْ يَكُونَ
فَرَقَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ
فِي فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّابِقِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَقَاءَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَلَهُ لُحْضٌ وَالْبَصْرُ وَالْخَصَنُ وَالْفَرْجُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَهُ
بُصْرٌ فَلَهُ لَهْ وَهْجٌ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

hal 15 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



رَدُّ الْمَقْلُوبِ هُكْمٌ عَلَى تَجِدِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama **M. Iqbal Abdullah** dengan calon istrinya bernama **Septiani Aeinun Fadillah R** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M. Iqbal Abdullah bin Abdullah** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Septiani Aeinun Fadillah R binti Abd. Rauf**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulka'dah 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Fatmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

hal 16 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks



Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

Rincian biaya perkara

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

hal 17 dari 17 hal Pen. No.305/Pdt.P/2020/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)